

**EFEKTIVITAS PROGRAM KREDIT MIKRO NAGARI
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN DAN KOTA SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

FERINDA RIZKY
BP/NIM : 2006/73983

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PROGRAM KREDIT MIKRO NAGARI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DAN KOTA SUMATERA BARAT

NAMA : FERINDA RIZKY
TM / NIM : 2006 / 73983
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Januari 2011

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S
NIP. 19610502 198601 2 001

Drs. Zul Azhar, M.Si
NIP. 19590805 198503 1 006

Diketahui Oleh :

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S
NIP. 19610502 198601 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Pengaji Skripsi Program Studi
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Judul : EFEKTIVITAS PROGRAM KREDIT MIKRO NAGARI
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN
DAN KOTA SUMATERA BARAT

Nama : Ferinda Rizky

TM / NIM : 2006 / 73983

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2011

Tim Pengaji

Nama	Tanda Tangan
------	--------------

- | | | |
|---------------|---------------------------|----------|
| 1. Ketua | Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S | 1. |
| 2. Sekretaris | Drs. Zul Azhar, M.Si | 2. |
| 3. Anggota | Drs. Akhirmen, M.Si | 3. |
| 4. Anggota | Dra. Armida S., M.Si | 4. |

ABSTRAK

Ferinda Rizky
2006/73983

: Efektivitas Program Kredit Mikro Nagari Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Sumatera Barat.

Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dibawah Bimbingan Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S dan Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh dana Kredit Mikro Nagari terhadap jumlah rumah tangga miskin di kabupaten dan kota Sumatera Barat, dan (2) Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah rumah tangga miskin di kabupaten dan kota Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan asosiatif, dimana penulis hanya menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dana Kredit Mikro Nagari dan pertumbuhan ekonomi, dan variabel terikatnya adalah jumlah rumah tangga miskin di kabupaten dan kota Sumatera Barat. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif dan *polling data* tahun 2007-2009 di kabupaten dan Kota Sumatera Barat. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode *Error Correction Model* yang menggabungkan efek jangka pendek dan jangka panjang, pada tingkat kepercayaan 95 persen ($\alpha = 0,05$).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, (1) Dana Kredit Mikro Nagari berpengaruh signifikan terhadap jumlah rumah tangga miskin di kabupaten dan kota Sumatera Barat ($-t_{hitung} = -2,0186 < -t_{tabel} = -2,0058$) dengan prob $0,0443 < \alpha = 0,05$ dengan tingkat pengaruh $-0,0066$ persen. (2) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah rumah tangga miskin di kabupaten dan kota Sumatera Barat ($-t_{hitung} = -0,3855 > -t_{tabel} = -2,0058$) dengan prob $0,7014 > \alpha = 0,05$ dengan tingkat pengaruh $-0,0244$ persen. Dan Dana Kredit Mikro Nagari dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah rumah tangga miskin di kabupaten dan kota Sumatera Barat ($F_{hitung} = 3,7196 > F_{tabel} = 2,7800$). Sumbangan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 17,37 persen dan sisanya 82,63 persen lainnya ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model analisis.

Hasil penelitian dalam jangka panjang menunjukkan bahwa (1) Dana Kredit Mikro Nagari berpengaruh signifikan terhadap jumlah rumah tangga miskin di kabupaten dan kota Sumatera Barat ($-t_{hitung} = -2,8265 < -t_{tabel} = -2,0049$) dengan prob $0,0066 < \alpha = 0,05$ dengan tingkat pengaruh $-0,0387$ persen. (2) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap jumlah rumah tangga miskin di kabupaten dan kota Sumatera Barat ($-t_{hitung} = -7,8212 < -t_{tabel} = -2,0049$) dengan prob $0,0000 < \alpha = 0,05$ dengan tingkat pengaruh $-0,5695$ persen. Dan Dana Kredit Mikro Nagari dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah rumah tangga miskin di kabupaten dan kota Sumatera Barat ($F_{hitung} = 38,8307 > F_{tabel} = 3,1700$). Sumbangan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 58,99 persen dan sisanya 41,01 persen lainnya ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka disarankan kepada pemerintah untuk (1) meningkatkan jumlah penerima bantuan pengentasan kemiskinan Kredit Mikro Nagari di Sumatera Barat dan meningkatkan kualitas pemberdayaan kepada masyarakat miskin. (2) melakukan pengembangan sektor unggulan yang terdapat di Sumatera Barat, misalnya pada sektor pertanian, dengan tujuan mampu menyerap banyak tenaga kerja selanjutnya dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang diiringi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. (3) meningkatkan perhatian kepada masyarakat miskin melalui pemberian bantuan pengentasan kemiskinan baik berupa modal uang, keterampilan, kesehatan, atau beasiswa pendidikan. Dan (4) agar berbagai program penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh masyarakat miskin dalam artian mereka mandiri dan tidak secara terus menerus mendapatkan bantuan dari pemerintah, sehingga mereka benar-benar lepas dari kemiskinan itu.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapan pada ALLAH SWT karena atas izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kemudian shalawat beriring salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini berjudul “Efektivitas Program Kredit Mikro Nagari Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Sumatera Barat”. Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan yang banyak dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Seiring dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Amar, M.S selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak dan ibu Dosen penguji skripsi yaitu Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S, Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si, Bapak Drs. Akhirmen, M.Si dan Ibu Dra. Armida S., M.Si yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S selaku ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Akhirmen, M.Si selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, staf pengajar dan pegawai tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah banyak membantu penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Pimpinan Bappeda Propinsi Sumatera Barat yang telah membantu penulis dalam pengambilan data.
7. Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat yang telah membantu penulis dalam pengambilan data.
8. Teristimewa kepada Mama dan Papa tercinta serta Abang ii dan kembaranku Riza yang tersayang, yang telah memberikan do'a dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. Sahabat dan teman-teman seperjuangan di Ekonomi Pembangunan angkatan 2006 yang telah memberikan dorongan moral kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyaknya kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang nantinya dapat menyempurnakan skripsi ini.

Akhirnya dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang setimpal dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS PENELITIAN	
A. Kajian Teori	12
1. Kemiskinan	12
a. Pengertian Kemiskinan	12
b. Ukuran Kemiskinan.....	15
2. Pengentasan Kemiskinan	19
3. Korelasi antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan	24
4. Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan	28
5. Program Pengentasan Kemiskinan Kredit Mikro Nagari	31
B. Temuan Penelitian Sejenis	36
C. Kerangka Konseptual	37

D. Hipotesis	38
--------------------	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian	40
C. Variabel dan Jenis data	40
D. Teknik pengumpulan data	41
E. Defenisi Operasional	42
F. Teknik Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	54
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	54
a. Keadaan Geografis	54
b. Topografi.....	55
c. Keadaan Iklim	56
d. Keadaan Penduduk.....	57
2. Analisis Deskriptif	60
a. Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten dan Kota Sumatera Barat.....	60
b. Perkembangan Dana Kredit Mikro Nagari di Kabupaten dan Kota Sumatera Barat.....	63
c. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Sumatera Barat.....	66
3. Analisis Induktif	69
a. Uji Stasionaritas.....	69
b. Uji dan Estimasi Kointegrasi	70
c. <i>Error Correction Model</i>	73
d. Uji Hipotesis	75
1) Uji t	76
2) Uji F	78
B. Pembahasan	79
1. Pengaruh Dana Kredit Mikro Nagari Terhadap Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten dan Kota Sumatera Barat	79

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten dan Kota Sumatera Barat	81
3. Pengaruh Dana Kredit Mikro Nagari dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten dan Kota Sumatera Barat.....	83
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2007-2009	4
1.2 Alokasi Dana Kredit Mikro Nagari Per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2007-2009	6
1.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2007-2009 (dalam Jutaan Rupiah)	9
4.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera Barat Tahun 2001-2008	58
4.2 Pertumbuhan Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2007-2009	61
4.3 Pertumbuhan Alokasi Dana Kredit Mikro Nagari Per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2007-2009	63
4.4 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2007-2009 (dalam jutaan Rupiah)	67
4.5 Hasil Uji Stasionaritas	69
4.6 Hasil Uji Kointegrasi.....	70
4.7 Hasil Estimasi Kointegrasi	71
4.8 Hasil Estimasi Regresi <i>Error Correction Model</i>	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual Efektivitas Program Kredit Mikro Nagari dalam Pengentasan Kemiskinan di kabupaten dan kota Sumatera Barat.	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Tabulasi Data	93
2. <i>Unit Root Tests</i>	96
3. <i>Johansen Cointegration Tests</i>	99
4. Hasil Estimasi Kointegrasi (Persamaan Jangka Panjang).....	101
5. <i>Error Correction Model (ECM)</i>	102
6. Tabel Distribusi t.....	103
7. Tabel Distribusi F.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan harus dipahami sebagai proses multidimensi yang mencakup perubahan orientasi dan organisasi sistem sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Tujuan akhir pembangunan adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari proses pembangunan yang mencakup usaha-usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraannya. Syarat utama pembangunan ekonomi adalah bahwa proses pembangunan bertumpu pada kemampuan ekonomi dalam negeri, atau tepatnya pada kemandirian. Kemandirian mengandung arti bahwa proses pembangunan diciptakan dari setiap anggota masyarakat, oleh setiap anggota masyarakat, dan untuk setiap anggota masyarakat.

Pada dasarnya, proses pembangunan ekonomi ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi atau meningkatkan pendapatan riil perkapita, dan hasil pembangunan tersebut akan dinikmati oleh masyarakat secara merata. Asumsi itu bersifat normatif dan tidak selalu bahkan sulit untuk dipenuhi. Artinya proses pembangunan tidak melibatkan seluruh (tidak semua) pelaku ekonomi dan peningkatan pendapatan sebagai hasil dari proses pembangunan tersebut tidak dinikmati oleh seluruh penduduk. Secara natural ada sebagian penduduk yang tidak ikut serta dalam menghasilkan sehingga tidak berhak menikmati hasil pembangunan.

Mekanisme pasar tidak berlangsung dengan natural, yakni adanya kekuatan tunggal baik di sisi produksi (monopoli) ataupun di sisi konsumsi (monopsoni) sehingga distribusi manfaat tidak sesuai dengan kemampuan masing-masing pelaku ekonomi. Pasar tidak berfungsi secara wajar atau sering disebut dengan *market failures*. Keadaan seperti ini merupakan suatu masalah yang muncul dalam pembangunan.

Kemiskinan adalah suatu situasi serba kekurangan dari penduduk yang terwujud oleh terbatasnya modal yang dimiliki. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan yang menyebabkan rendahnya pendapatan dan terbatasnya kesempatan berperan dalam pembangunan. Rendahnya pendapatan penduduk miskin mengakibatkan rendahnya pendidikan dan kesehatan sehingga mempengaruhi produktivitas mereka yang sudah rendah dan akhirnya meningkatkan beban ketergantungan bagi masyarakat. Penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan adalah mereka yang berpendapatan sangat rendah, tidak berpendapatan tetap, atau tidak berpendapatan sama sekali.

Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang akan dilihat alternatif pengentasan kemiskinannya melalui program pemberdayaan masyarakat miskin. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk

mengentaskan kemiskinan telah dilakukan, diantaranya program beras miskin, bantuan langsung tunai, program pembinaan usaha kecil dan koperasi, dan lainnya. Namun, program pengentasan kemiskinan tersebut seringkali mengalami permasalahan yang tidak mengubah tingkat kemiskinan di masing-masing daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Tabel 1.1 perkembangan jumlah rumah tangga miskin (RTM) menurut kabupaten/kota di Sumatera Barat pada tahun 2007 hingga tahun 2009 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 1,11 %. Adapun kenaikan tertinggi terdapat di Kabupaten Pasaman sebesar 26,62 %. Sedangkan penurunan jumlah RTM terbesar terjadi di Kota Padang Panjang dengan persentase -22,75 %.

Terjadinya kenaikan jumlah RTM di beberapa kabupaten dan kota Sumatera Barat kemungkinan diakibatkan bantuan pengentasan kemiskinan tidak dapat berjalan secara efektif di daerah tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh bantuan modal yang telah pemerintah berikan hanya dihabiskan untuk kebutuhan hidup sehari-hari mereka, namun tidak digunakan untuk mengembangkan suatu usaha yang dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.

Sedangkan terjadinya penurunan rumah tangga miskin di kabupaten dan kota di Sumatera Barat ini kemungkinan disebabkan oleh adanya berbagai program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dari pemerintah. Ditambah lagi dengan semangat kaum miskin yang berjuang untuk memperbaiki kehidupannya agar lebih layak melalui dana yang diberikan pemerintah tersebut

Tabel 1.1 Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2007-2009.

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Kabupaten					
1.	Kepulauan Mentawai	8,204	8,204	9,068	5.27
2.	Pesisir Selatan	15,175	14,212	14,044	-3.76
3.	Solok	11,373	11,120	10,169	-5.39
4.	Sijunjung	4,894	4,876	4,335	-5.73
5.	Tanah Datar	5,080	5,482	4,955	-0.85
6.	Padang Pariaman	10,118	8,175	7,675	-12.66
7.	Agam	3,008	3,021	3,067	0.98
8.	Lima Puluh Kota	6,628	6,324	5,666	-7.50
9.	Pasaman	3,968	3,794	5,980	26.62
10.	Solok Selatan	2,354	2,314	2,533	3.88
11.	Dharmas Raya	5,181	5,392	5,111	-0.57
12.	Pasaman Barat	7,961	7,345	8,927	6.90
Kota					
13.	Padang	4,349	4,759	4,246	-0.68
14.	Solok	951	1,169	1,069	7.18
15.	Sawahlunto	512	644	449	-2.25
16.	Padang Panjang	215	158	128	-22.75
17.	Bukittinggi	950	903	759	-10.45
18.	Payakumbuh	877	1,027	876	1.20
19.	Pariaman	1,495	1,748	1,436	-0.46
	Rata-rata	4,910	4,772	4,763	-1.11

Sumber : BKBN Provinsi Sumatera Barat (dalam Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2007-2009, BPS)

Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Sumatera Barat adalah Kredit Mikro Nagari, yang diberikan kepada kelompok keluarga miskin untuk mendukung ketersediaan modal usaha dalam rangka mengembangkan usaha untuk meningkatkan pendapatan, yang sekaligus meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan standar

yang ada. Berdasarkan Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari (2009:7), tujuan penyaluran bantuan Kredit Mikro Nagari adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya perilaku positif pada keluarga miskin dan stakeholders terkait.
2. Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi.
3. Terselenggaranya sistem perencanaan dan pengawasan pembangunan yang partisipatif.
4. Terwujudnya sinergitas program antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat/stakeholders.
5. Meningkatnya partisipasi perantau dalam menanggulangi kemiskinan di Nagari.
6. Tumbuhnya rasa hidup ber-Nagari di tengah-tengah masyarakat.
7. Terbangunnya kapasitas Nagari sebagai basis ketahanan masyarakat.
8. Terciptanya Lembaga Pengelolaan Keuangan Nagari.

Bidang usaha yang dibantu atau difasilitasi oleh Kredit Mikro Nagari, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi sumberdaya (sumberdaya alam dan kapasitas sumberdaya manusia) yang ada di Nagari tersebut. Agar bidang usaha yang mereka jalankan dapat membantu meningkatkan ekonomi mereka. Besaran alokasi dana Kredit Mikro Nagari pada masing-masing daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan jumlah atau persentase rumah tangga miskin dan jumlah nagari yang menerimanya. Masing-masing nagari yang disalurkan Kredit Mikro Nagari berdasarkan kelompok usaha (maksimal 10 kelompok) yang jumlah keanggotaan sesuai dengan jenis usahanya.

Adapun pengalokasian dananya dapat dilihat pada Tabel 1.2:

Tabel 1.2 Alokasi Dana Kredit Mikro Nagari Per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2007-2009

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Kabupaten					
1	Kepulauan Mentawai	1,200,000,000	0	0	-100.00
2	Pesisir Selatan	3,900,000,000	1,800,000,000	0	-27.42
3	Solok	2,400,000,000	2,100,000,000	1,500,000,000	-20.54
4	Sijunjung	1,200,000,000	1,200,000,000	3,000,000,000	75.00
5	Tanah Datar	1,800,000,000	2,700,000,000	3,600,000,000	41.67
6	Padang Pariaman	2,400,000,000	2,100,000,000	2,400,000,000	0.89
7	Agam	2,400,000,000	3,000,000,000	6,900,000,000	77.50
8	Lima Puluh Kota	1,800,000,000	2,400,000,000	3,000,000,000	29.17
9	Pasaman	2,400,000,000	2,100,000,000	300,000,000	-49.11
10	Solok Selatan	900,000,000	900,000,000	1,500,000,000	33.33
11	Dharmas Raya	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0.00
12	Pasaman Barat	3,000,000,000	0	0	-100.00
Kota					
13	Padang	3,600,000,000	3,900,000,000	0	-45.83
14	Solok	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0.00
15	Sawahlunto	300,000,000	300,000,000	0	-50.00
16	Padang Panjang	300,000,000	300,000,000	600,000,000	50.00
17	Bukittinggi	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0.00
18	Payakumbuh	600,000,000	600,000,000	0	-50.00
19	Pariaman	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0.00
	Rata-rata	1,578,947,368	1,326,315,789	1,294,736,842	-7.12

Sumber : BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Tabel 1.2, rata-rata pertumbuhan dana Kredit Mikro Nagari di kabupaten/kota Sumatera Barat dari tahun 2007 hingga 2009 mengalami penurunan sebesar -7,12 %. Pertumbuhan dana Kredit Mikro Nagari terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pasaman Barat sebesar -100 %.

Sedangkan pertumbuhan tertinggi dana Kredit Mikro Nagari terdapat di Kabupaten Agam dengan persentase sebesar 77,50 %.

Berdasarkan Tabel 1.2, pada tahun 2008 dan 2009 Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Pasaman Barat tidak lagi mendapatkan dana Kredit Mikro Nagari atau mengalami penurunan sebesar 100 %. Hal ini mungkin disebabkan oleh penyaluran bantuan pada tahun berikut tidak berjalan dengan lancar oleh pemerintah, sehingga bantuan tersebut tidak dapat disalurkan pada daerah bersangkutan.

Pada Tabel 1.2 juga dapat diperoleh gambaran bahwa beberapa kabupaten/kota terjadi peningkatan dana Kredit Mikro Nagari hingga tahun 2009. Hal ini kemungkinan dapat disebabkan oleh bertambahnya masyarakat miskin yang membutuhkan dana tersebut. Selebihnya kota/kabupaten yang total penyaluran dana Kredit Mikro Nagari tidak mengalami perubahan (pada tabel mengalami pertumbuhan sebesar 0 %) artinya pemerintah tidak perlu memberikan tambahan atau pengurangan dana kepada daerah-daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak pembangunan yang dilaksanakan, khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami penurunan, itu berarti mengindikasikan bahwa terdapat ketidakberesan dalam proses pembangunan. Masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari terganggunya perekonomian seperti pengangguran yang berujung pada kemiskinan.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi per kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000 pada Tabel 1.3.

Penurunan jumlah rumah tangga miskin di Sumatera Barat ternyata sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonominya. Berdasarkan Tabel 1.3, rata-rata PDRB per kabupaten/kota di Sumatera Barat pada tahun 2007-2009 mengalami kenaikan sebesar 3,73 %. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh semakin berkembangnya perekonomian Sumatera Barat di segala bidang termasuk dalam upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan ini sesuai dengan menurunnya angka rumah tangga miskin sebesar -1,11 %.

Pada Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa pertumbuhan PDRB tertinggi di Sumatera Barat pada tahun 2007-2009 adalah Kota Bukittinggi dengan peningkatan sebesar 7,13 %. Dengan terjadinya kenaikan angka PDRB tersebut berarti Kota Bukittinggi telah berhasil meningkatkan perekonomiannya sekaligus mampu mengurangi angka rumah tangga miskin sebesar -10,45 % seperti yang digambarkan Tabel 1.1.

Data dalam Tabel 1.3 menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmas Raya adalah daerah yang persentase pertumbuhan PDRB terkecil dengan angka penurunan sebesar -19,66 %. Namun, jika dikembalikan lagi ke Tabel 1.1 penurunan PDRB di Kab. Dharmas Raya ini tidak berdampak terhadap peningkatan jumlah rumah tangga miskin di daerah tersebut. Sebaliknya jumlah RTM di Dharmas Raya justru mengalami penurunan sebesar -0,57 %. Ini berarti penurunan pertumbuhan ekonomi

belum tentu dapat menaikkan angka kemiskinan, dan sebaliknya peningkatan pertumbuhan ekonomi belum tentu dapat mengurangi angka kemiskinan.

Tabel 1.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2007- 2009 (dalam Jutaan Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Kabupaten					
1	Kepulauan Mentawai	465,786.51	486,658.71	509,396.33	4.58
2	Pesisir Selatan	1,801,336.27	1,898,901.90	2,002,248.56	5.43
3	Solok	1,811,861.00	1,926,834.49	2,004,641.50	5.19
4	Sijunjung	1,144,807.17	1,209,978.39	1,286,553.79	6.01
5	Tanah Datar	2,201,714.59	2,331,745.79	2,468,737.03	5.89
6	Padang Pariaman	2,489,734.43	2,645,119.06	2,749,336.74	5.09
7	Agam	41,179.42	43,271.33	36,464.58	-5.33
8	Lima Puluh Kota	2,398,597.58	2,545,801.73	2,673,665.12	5.58
9	Pasaman	1,145,234.53	1,214,884.21	1,278,446.33	5.66
10	Solok Selatan	546,074.76	579,478.58	616,507.90	6.25
11	Dharmas Raya	957,502.47	486,658.71	534,648.42	-19.66
12	Pasaman Barat	2,250,818.84	2,394,846.43	2,544,855.11	6.33
Kota					
13	Padang	10,165.74	10,797.26	11,345.64	5.65
14	Solok	445,151.82	473,694.17	497,623.07	5.73
15	Sawahlunto	458,646.42	474,234.54	494,392.38	3.82
16	Padang Panjang	351,227.59	373,245.04	396,823.88	6.29
17	Bukittinggi	862,157.54	918,888.49	989,393.24	7.13
18	Payakumbuh	727,773.48	774,495.30	819,397.16	6.11
19	Pariaman	621,504.32	656,273.02	685,632.24	5.03
	Rata-rata	1,091,119.71	1,128,726.69	1,189,479.42	3.73

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat 2007-2009 (data diolah)

Terjadinya peningkatan terus menerus pada angka PDRB menandakan Sumatera Barat masih terus berupaya untuk melakukan pembangunan di segala bidang demi kesejahteraan rakyatnya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam sebuah penelitian. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui seberapa efektifnya salah satu program penanggulangan kemiskinan serta untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi ikut mempengaruhi turunnya angka kemiskinan di Sumatera Barat pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, karena pada saat sekarang ini Sumatera Barat sedang giat-giatnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan termasuk membantu masyarakatnya yang berada dalam garis kemiskinan. Dengan demikian, penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **"Efektivitas Program Kredit Mikro Nagari dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Sumatera Barat"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah:

1. Sejauhmana pengaruh dana Kredit Mikro Nagari terhadap jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten dan Kota Sumatera Barat?
2. Sejauhmana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten dan Kota Sumatera Barat?
3. Sejauhmana pengaruh dana Kredit Mikro Nagari dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten dan Kota Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh dana Kredit Mikro Nagari terhadap jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten dan Kota Sumatera Barat.
2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten dan Kota Sumatera Barat.
3. Pengaruh dana Kredit Mikro Nagari dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten dan Kota Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan ilmu terutama ilmu ekonomi pembangunan.
2. Bagi penulis, untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bagi perguruan tinggi, dapat meningkatkan peran perguruan tinggi sebagai penyumbang, pemberi gagasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, keadilan dan kemajuan manusia.
4. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan bagi pihak lain dalam melakukan penelitian yang sama pada masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Teori

1. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Setiap negara yang melaksanakan pembangunan menuju pada peningkatan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi lebih berarti jika diikuti pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, pemisah yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya.

Kartasasmita (dalam Bahri, 2003:13) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Selanjutnya BPS (dalam Hasriati, 2005:2) mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati pengeluaran) lebih

kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan hidup layak diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2.100 kalori sehari, perumahan, pakaian, kesehatan dan pendidikan.

Kemiskinan juga dapat diidentifikasi dari ciri-ciri yang melekat pada penduduk miskin tersebut. Ciri tersebut antara lain ditandai oleh sikap dan tingkah laku penduduk yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat dirubah, rendahnya kemauan untuk maju, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, rendahnya produktifitas, dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan (Todaro, 2000:31).

Menurut Arsyad (1999:237-238) kemiskinan dapat diamati sebagai kondisi anggota masyarakat yang tidak atau belum ikut serta dalam proses perubahan. Karena tidak mempunyai kemampuan baik dalam pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai. Sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan, ini dapat disebabkan karena secara alamiah belum mampu mendayagunakan faktor produksinya.

Todaro (2000:32) menyatakan seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, antara lain pangan, sandang kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Konsep ini dimaksudkan

untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

Selain kemiskinan absolut, terdapat juga konsep kemiskinan kultural dan kemiskinan relatif (Sumodiningrat, 1998:30). Kemiskinan kultural disebabkan pemahaman suatu sikap, kebijakan hidup dan budaya seseorang atau masyarakat yang merasa berkecukupan dan tidak kekurangan. Secara umum, kelompok ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan dan cenderung tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya meskipun ada usaha pihak luar untuk membantu. Dengan ukuran absolut mereka dapat dikatakan miskin, tetapi mereka tidak merasa miskin dan tidak mau disebut miskin.

Sedangkan kemiskinan relatif adalah pendapatan seseorang yang sudah berada di atas garis kemiskinan, namun relatif masih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat, maka orang atau keluarga tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Kemiskinan relatif erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang bersifat struktural, yakni kebijaksanaan pembangunan belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Dari beberapa konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Dalam hal ini perkiraan pendapatan tersebut harus masuk kebutuhan pokok atau

kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup layak. Bila sekiranya tingkat pendapatan seseorang atau keluarga tidak mencukupi kebutuhan minimum, maka orang atau keluarga tersebut dapat dikatakan miskin. Selanjutnya, kemiskinan terdiri dari tiga kategori yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan kultural, dan kemiskinan relatif.

b. Ukuran Kemiskinan

Ukuran kemiskinan yang lebih banyak digunakan adalah indeks pembangunan manusia, indeks kemiskinan manusia, indeks kesetaraan gender, dan lain-lainnya. Dengan ukuran indeks ini, potret kemiskinan secara makro dapat dikemukakan lebih lengkap.

Todaro (2000:59) mengemukakan kriteria kemiskinan yang sering digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan, yaitu:

1) Garis kemiskinan resmi

Garis kemiskinan resmi adalah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam usaha-usahanya untuk mengukur tingkat kemiskinan. Dasar perkiraan garis kemiskinan resmi berbeda antara negara satu dengan negara lain.

Di Indonesia batasan garis kemiskinan yang digunakan adalah batasan garis yang dikemukakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), pengukurannya dilakukan dengan cara menghitung pengeluaran dalam rupiah yang digunakan untuk memenuhi kecukupan konsumsi makanan 2.100 kalori per hari.

2) Garis kemiskinan internasional

Adapun masalah yang timbul dalam menentukan batas kemiskinan penduduk secara internasional adalah sulitnya menentukan tingkat hidup minimum, hal ini disebabkan karena tingkat tersebut berbeda dari satu negara dengan negara lain. Kesulitan pengukuran tersebut juga mencerminkan perbedaan kebutuhan-kebutuhan psikologis, sosial, dan ekonomi dari setiap orang apalagi mereka berasal dari negara yang berbeda.

Oleh karena itu para ahli ekonomi cenderung membuat perkiraan-perkiraan yang serba konservatif atau sederhana tentang kemiskinan dunia dalam rangka menghindari perkiraan-perkiraan yang berlebihan. Adapun perkiraan itu sendiri didasarkan pada metodologi umum yang sudah populer dengan sebutan garis kemiskinan internasional.

Selanjutnya menurut penelitian Harahap (2006:19), suatu rumah tangga dapat dilihat tingkat kesejahteraannya dan penghidupan yang layak dari beberapa kondisi sosial ekonomi yaitu : perumahan, lama kawin, lama kepemilikan sumber daya ekonomi dan jumlah tanggungan keluarga. Kelima indikator tersebut dapat memberikan suatu kondisi apakah suatu rumah tangga digolongkan rumah tangga miskin atau tidak miskin. Perumahan dan permukiman dalam kehidupan manusia memiliki fungsi dan peran penting serta arti dan makna yang dalam. Keadaan perumahan mencerminkan taraf hidup, kepribadian, dan peradaban penghuninya.

Kriteria masyarakat miskin lainnya adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut terdiri dari hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan hak lainnya.

Selanjutnya menurut Arsyad (2000:13), kemiskinan dapat dilihat dari beberapa pendekatan atau sudut pandang antara lain dari sisi ekonomi atau dari aspek pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan), yang ukurannya sangat relatif dan sangat ditentukan oleh penetapan garis kemiskinan oleh masing-masing negara.

Garis kemiskinan merupakan patokan terpenting untuk mengukur tingkat kemiskinan. Oleh karena itu kebijaksanaan untuk mengatasi kemiskinan akan terkait dengan tolok ukur garis kemiskinan. Pada dasarnya terdapat dua pendekatan dalam mengukur tingkat kemiskinan, menurut Widodo (dalam Syaid, 2007:17) diperoleh dari persamaan :

$$K = \frac{q}{n} \times 100\%$$

Dimana :

K = tingkat kemiskinan

q = jumlah penduduk miskin atau berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk

Berdasarkan Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari (2009:16-17), Bank Dunia, BPS, dan BKKBN memberikan kriteria kemiskinan sebagai berikut:

- 1) Bank Dunia
Penghasilan < US \$ 1 = Rp. 9.000,- / hari
- 2) BPS s/d Tahun 2004
 - Sangat miskin : < 1900 kal/org/hari + Rp. 120.000/bln
 - Miskin : 1900 – 2100 kal/org/hari + Rp. 120.000/bln
 - Hampir miskin : 2100 – 2300 kal/org/hari + Rp. 175.000/bln
- 3) BKKBN
 - a) Pra-sejahtera:
 - Ekonomi : makan < 2 kali per hari; tidak ada pakaian ganti; sebagian besar berlantai tanah.
 - Non Ekonomi : tidak beribadah; berobat tidak ke sarana kesehatan.
 - b) Pra-Sejahtera I :
 - Ekonomi : tidak makan daging > 1 minggu; luas lantai < 8 m² per jiwa
 - Non Ekonomi : sakit 3 bulan terakhir dan tidak ke sarana kesehatan

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi atau penggolongan orang atau masyarakat itu dikatakan miskin, ditetapkan dengan menggunakan tolak ukur. Tolak ukur yang umumnya dipakai adalah tingkat pendapatan dan kebutuhan relatif. Selanjutnya suatu rumah tangga dapat dilihat tingkat kesejahteraannya dan penghidupan yang layak dari beberapa kondisi sosial ekonomi. Ukuran kemiskinan ini sangat diperlukan terutama untuk kebijaksanaan dalam mengatasi persolan kemiskinan itu sendiri.

2. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak masyarakat miskin supaya mengeluarkan mereka dari kondisi keterpurukan dan ketidakberdayaan.

Selanjutnya Tjiptoherijanto (1997:80) mengatakan usaha-usaha untuk mencapai masalah kemiskinan di Indonesia pada dasarnya diarahkan pada penyesuaian kebijaksanaan makroekonomi sehingga mampu menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi memang diperlukan tetapi belum mencukupi dalam mengatasi masalah kemiskinan. Penurunan jumlah penduduk miskin mengandung pula pengertian usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia.

Selanjutnya Todaro (2000:321) juga menyimpulkan bahwa salah satu cara atau mekanisme yang utama dalam rangka mengurangi kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara berkembang adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang memadai bagi kelompok yang paling miskin. Penyediaan lapangan pekerjaan ini merupakan elemen kunci dari keseluruhan upaya pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan persoalan pembangunan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya kemiskinan disebabkan oleh ketidakberdayaan, keterkucilan, kekurangan materi, kelemahan fisik, kerentanan dari sikap atau perilaku, maka yang dilakukan adalah dengan memenuhi penyebab kemiskinan untuk mengeluarkan mereka dari kondisi tersebut.

Memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Ini berarti bahwa memberdayakan masyarakat itu adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, dalam hal ini rakyat yang berpendapatan rendah, miskin, dan terbelakang, khususnya dalam kehidupan ekonominya. Jadi pemberdayaan itu adalah upaya untuk membangun daya dan tenaga yang dimiliki masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berusaha untuk dapat mengembangkan dalam kehidupannya.

Andaikan ketidakberdayaan mereka disebabkan karena kekurangan modal usaha padahal memiliki kemampuan berwirausaha atau membuat produk-produk yang bisa dilakukan di rumah, maka diberikan modal usaha secukupnya. Hal ini sesuai dengan Sa'ad (dalam Nasha, 2006:32) bahwa investasi yang dilakukan bisa diwujudkan dengan membangun fasilitas-fasilitas kegiatan ekonomi ataupun peralatan dan mesin produksi serta sarana transportasi. Dengan meningkatnya kegiatan investasi, sektor produksi akan lebih bergairah sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat sebagai efek domino.

Apabila ketidakberdayaan lebih banyak diakibatkan oleh sumberdaya manusia yang rendah, berarti akar permasalahan yang perlu diatasi dengan memberikan beasiswa bagi golongan miskin yang memiliki minat melanjutkan pendidikan atau memberikan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang sedang

melaksanakan pendidikan. Menurut Djojohadikusumo (dalam Nasha,2006: 32) bahwa pendidikan merupakan prasyarat untuk meningkatkan martabat manusia. Melalui pendidikan masyarakat mendapat kesempatan untuk membina kemampuan dan mengatur kehidupannya secara wajar. Perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan berarti membuka kesempatan ekonomis untuk mengupayakan perbaikan dan kemajuan dalam kehidupan manusia.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Simanjuntak (1998:86) bahwa pendidikan dan latihan dipandang sebagai investasi di bidang sumberdaya manusia untuk meningkatkan produktivitas kerja dan untuk meningkatkan penghasilan.

Menurut Basri (2002:98), kemiskinan diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokrasi, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga suatu negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit, dan akses pasar). Selain itu, kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi. Dengan kata lain, kemiskinan di sebabkan sangat terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan.

Keterbatasan peluang ini, selain disebabkan hambatan internal kelompok miskin, terutama diakibatkan juga oleh konstelasi struktur ekonomi dan politik yang otoritarian dan tidak berpihak pada golongan lemah. Dan terbentuknya

struktur ekonomi dan politik tersebut diakibatkan oleh pola insentif institusional yang bersifat mencari keuntungan pribadi/golongan (*rent seeking behavior*), otoriter, dan sentralistik.

Sehubungan dengan itu, Basri (2002:99-100) mengemukakan untuk menghapus masalah kemiskinan yang kini semakin krusial di Indonesia, perlu dilakukan langkah-langkah merombak struktur otoritarian dan monopolistik, dengan strategi penguatan posisi politik dan ekonomi kelompok masyarakat miskin. Penguatan posisi politik dapat dilakukan dengan mendorong pengorganisasian diri masyarakat miskin demi tindakan partisipatif, dengan cara merubah peraturan yang membatasi (seperti masalah perizinan atau formalisasi) menjadi peraturan yang memfasilitasi. Sementara, penguatan ekonomi dilakukan dengan strategi merombak struktur ekonomi yang monopolistik dan antipersaingan menjadi struktur yang lebih adil dan kondusif, serta strategi untuk meningkatkan akses kelompok masyarakat miskin terhadap sumber daya. Untuk mewujudkannya perlu upaya yang simultan dan komprehensif sebagai berikut:

- a. Memfokuskan investasi di bidang pengembangan sumber daya manusia khususnya pendidikan dasar.
- b. Menyusun kebijakan yang mengarah pada stabilitas ekonomi dengan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dan hasilnya bisa terdistribusikan pada seluruh lapisan masyarakat secara adil.

- c. Menciptakan lingkungan kompetisi yang fair bagi usaha kecil, dengan jalan merombak struktur ekonomi yang monopolistik dan antipersaingan.
- d. Meningkatkan akses kelompok ekonomi kecil terhadap berbagai sumber daya ekonomi, yaitu terutama modal, tanah, serta informasi dan teknologi.
- e. Melakukan deregulasi terhadap komoditi yang pemasarannya diatur atau dipegang pemerintah.
- f. Mengubah bentuk insentif institusional bagi birokrat di tingkat lokal, dengan jalan memberikan perizinan usaha secara gratis, sehingga usaha kecil akan terdorong untuk mendaftarkan usahanya dan pemerintah daerah dapat memperoleh peningkatan pajak dari usaha kecil tersebut.
- g. Menghapuskan berbagai pungutan bagi usaha kecil.
- h. Menghapuskan kredit bersubsidi pada bunga dan membiarkan penyediaan kredit berjalan dengan mekanisme pasar.
- i. Mengalihkan subsidi dalam bentuk bantuan biaya operasional untuk institusi yang mempunyai kinerja yang baik.
- j. Mendorong kemungkinan pembentukan lembaga akreditasi nirlaba bagi institusi keuangan yang independen.
- k. Meningkatkan transparansi dan *accountability*.
- l. Mendorong penggunaan model skim pembiayaan oleh lembaga perbankan terhadap usaha kecil.
- m. Mendorong kemungkinan pembentukan lembaga penjamin bagi usaha kecil untuk pinjaman yang lebih besar, misalnya ke bank.

- n. Melonggarkan perizinan pendirian organisasi seperti serikat kerja.
- o. Menyediakan lembaga konsultasi untuk membantu masyarakat paling miskin yang bisa merangsang lebih banyak pemberian pinjaman dan dukungan kredit mikro untuk masyarakat yang sangat miskin.
- p. Memacu penyediaan lapangan pekerjaan penuh dan produktif serta memperkuat integrasi sosial.
- q. Mencabut distorsi kebijakan terhadap produsen pertanian.
- r. Melonggarkan peraturan yang membatasi permintaan tenaga kerja.
- s. Mendorong investasi pada infrastruktur fisik, penyuluhan pertanian.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya dalam mengatasi persoalan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan sejumlah modal kepada masyarakat miskin, tetapi yang juga perlu diperhatikan adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kaum miskin, sehingga mereka dapat memanfaatkan modal yang tersedia secara berkelanjutan. Pada akhirnya upaya pengentasan kemiskinan tersebut diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat miskin.

3. Korelasi antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan. Alasan yang sering dikemukakan adalah tingkat pertumbuhan ekonomi sebenarnya yang pesat memainkan peranan dalam mengurangi kemiskinan. Namun cukup banyak bukti bahwa tingkat

pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan (Muharja, 2000:40).

Menurut Lim (dalam Muharja, 2000:42), pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menurunkan kemiskinan, karena kelompok miskin mendapat proporsi yang tetap pada penambahan pengeluaran selama proses pembangunan. Keadaan ini dapat berlaku jika terjadi pemilikan faktor produksi yang hampir sama dalam masyarakat.

Kemudian Todaro (2003:252) mengatakan pendapatan yang rendah dan standar hidup yang buruk yang dialami oleh golongan miskin, yang tercermin dari kesehatan, gizi, dan pendidikan yang rendah dapat menurunkan produktivitas ekonomi mereka dan akibatnya secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat. Jadi strategi yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup golongan miskin tidak saja akan memperbaiki kesejahteraan mereka, akan tetapi juga akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan seluruh perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 1994:10)

Menurut Djojohadikusumo (1994:1) pertumbuhan ekonomi bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut

perkembangan yang berdimensi tunggal dan dapat diukur dengan peningkatan hasil pendapatan.

Teori pertumbuhan klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith (1723-1790) menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas lahan dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan.

Inti ajaran Smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa saja yang dirasa terbaik untuk dilakukan. Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi pada kondisi *full employment*, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stationer (*stationary state*).

Menurut Todaro (2000:92) ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu:

a. Akumulasi modal

Akumulasi modal (*capital accumulation*), yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari.

b. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja

Pertumbuhan dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan

ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.

c. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan tradisional seperti kegiatan menanam jagung, membuat pakaian atau membangun rumah.

Jadi dengan terpenuhinya komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi tersebut di atas yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi, maka setiap negara pasti akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya..

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi dengan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang baik di suatu negara menandakan bahwa kinerja perekonomian negara tersebut berjalan dengan baik pula karena faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi, telah termanfaatkan secara optimal. Pengangguran menurun, sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai karena kebutuhan hidup mereka terpenuhi dengan baik. Dengan demikian angka kemiskinan pun menurun dan pertumbuhan ekonomi meningkat.

4. Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan

Efektivitas menurut Ilham dkk (2006:162) dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mencapai hasil yang maksimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Menurut Devas (dalam Fatchanie, 2007:45) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya efektivitas merupakan segala usaha yang ditempuh demi terwujudnya tujuan organisasi, meskipun dengan keterbatasan sumber-sumber yang dimilikinya. Oleh sebab itu, untuk mengetahui efektif tidaknya tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan dari program pengentasan kemiskinan perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya efektivitas dari program tersebut.

Program pengentasan kemiskinan Kredit Mikro Nagari merupakan salah satu kebijakan publik yang didanai oleh pemerintah. Menurut Ramdan dkk (dalam Ilham dkk, 2006:162) ukuran efektivitas kebijakan publik adalah

- (1) Efisiensi. Suatu kebijakan harus mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya secara optimal; (2) Adil. Bobot kebijakan harus ditempatkan

secara adil, yakni kepentingan publik tidak terabaikan; (3) Mengarah kepada insentif. Suatu kebijakan harus mengarah kepada atau merangsang tindakan dalam perbaikan dan peningkatan sasaran yang ditetapkan; (4) Diterima oleh publik. Oleh karena diperuntukkan bagi kepentingan publik maka kebijakan yang baik harus diterima oleh publik; (5) Moral. Suatu kebijakan harus dilandasi oleh moral yang baik.

Sedangkan menurut Hoogerwerf (dalam Irawan, 2008:122), terdapat beberapa faktor yang sangat menentukan efektivitas kebijakan publik yaitu: akurasi rumusan kebijakan, kelengkapan informasi yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan, dukungan publik terhadap kebijakan yang dikembangkan, dan kualitas intelektual dan moralitas para pelaksana kebijakan. Disamping faktor-faktor tersebut, Dunn, Howlett, Rames, dan Gaus dalam Stillman II (dalam Irawan, 2008:122) mengungkapkan bahwa kegagalan suatu kebijakan publik seringkali dipengaruhi pula oleh kondisi lingkungan kebijakan itu sendiri yang tidak kondusif. Sedangkan Edwards (dalam Irawan, 2008:122) mengemukakan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan publik yaitu: rumusan kebijakan dan komunikasi kebijakan, ketersediaan sumberdaya, perilaku pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi organisasi pelaksana kebijakan.

Secara ringkas penjelasan tentang peranan faktor-faktor tersebut di atas dalam mempengaruhi efektivitas suatu kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah program pengentasan kemiskinan Kredit Mikro Nagari, dapat diuraikan sebagai berikut. Untuk mengimplementasi suatu kebijakan publik secara efektif

maka rumusan suatu kebijakan harus jelas dan akurat. Rumusan kebijakan harus realistik dan dengan jelas menyebutkan obyek kebijakan beserta kewajiban yang harus dilaksanakan dan sangsi yang berlaku jika kebijakan tidak dilaksanakan. Setiap pihak yang berwenang mengimplementasikan kebijakan tersebut harus memahami dengan baik rumusan kebijakan.

Masalahnya bagaimana mengukur efektivitas. Ukuran yang digunakan Sanim dan Simatupang (dalam Ilham dkk.:2006) adalah pendekatan ekonometrika dari nilai elastisitas dan tingkat signifikansi peubah independen terhadap peubah dependen. Jika pengaruhnya signifikan dan elastis, maka pengaruh peubah independen terhadap peubah dependen dikatakan efektif. Jika peubah dana Kredit Mikro Nagari secara statistik signifikan mempengaruhi jumlah rumah tangga miskin di kabupaten/kota Sumatera Barat dan nilai elastisitas > 1 , maka Kredit Mikro Nagari efektif menurunkan jumlah rumah tangga miskin.

Efektivitas menurut konsep kebijakan publik di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas menunjukkan kemampuan suatu kegiatan (dalam hal ini program pengentasan kemiskinan) dalam mencapai sasaran atau hasil akhir yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil yang maksimal berarti menggambarkan bahwa kegiatan tersebut telah berjalan dengan efektif.

Program pengentasan kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu program yang dilakukan oleh suatu perorangan atau kelompok yang berupaya untuk bisa menarik diri atau membantu masyarakat yang dikategorikan miskin dengan

harapan bisa keluar dari kondisi tersebut sehingga mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas program pengentasan kemiskinan berarti suatu ukuran keberhasilan dari program yang berupaya dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Efektif atau tidaknya program dalam mengatasi persoalan kemiskinan dapat dilihat dari meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat miskin yang telah menjalankan program pengentasan kemiskinan tersebut.

5. Program Pengentasan Kemiskinan Kredit Mikro Nagari

Meskipun berbagai macam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan, namun dalam rangka peningkatan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan untuk menggerakkan perekonomian keluarga miskin, maka perlu dilakukan intervensi terhadap keluarga miskin dengan menyediakan Kredit Mikro Nagari sebagai tambahan modal usaha. Kredit Mikro Nagari merupakan bagian penting dari penanggulangan kemiskinan yang belum disentuh dengan pendekatan modal sosial nagari oleh program penanggulangan kemiskinan lainnya.

Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan "*as local as possible*" yaitu semaksimal mungkin mengikutsertakan institusi lokal, sehingga penanganannya diharapkan akan lebih memiliki komitmen yang tinggi, konsisten penanganannya dan program berkelanjutan. Menurut Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari

(2009:2), di Sumatera Barat pendekatan institusi lokal tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari karena sesuai budaya Minangkabau dan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, yang menyatakan bahwa Nagari adalah unit pemerintahan terdepan serta berperan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat.

Pengertian lokal tidak hanya diartikan sebagai kedekatan lokasi tetapi yang terpenting adalah kedekatan emosional. Oleh karena itu, Pemerintah Nagari dinilai mampu memahami pendekatan kelompok di daerahnya melalui ikatan emosional yang dekat dalam memberdayakan masyarakatnya yang miskin. Kelompok keluarga miskin yang dibentuk bisa saja mempunyai basis: suku, mesjid/surau (kelompok keagamaan), lapangan usaha, ataupun keluarga. Tujuannya antara lain agar perilaku (suara hati) dari rumah tangga miskin tersebut lebih bisa didengar sehingga mempermudah upaya pemberdayaannya.

Pengertian pemberdayaan dalam konteks ini adalah memberikan bantuan modal usaha tetapi diiringi dengan pertanggungjawaban produksi melalui proses perilaku positif (jujur, produktif, kerja keras, bertanggungjawab, dan memahami arti kerjasama usaha). Karena kunci akar permasalahan kemiskinan adalah perilaku. Dengan demikian, tanpa perbaikan atau perubahan perilaku orang miskin ke arah yang lebih baik, maka berbagai usaha untuk membantunya akan menjadi sia-sia.

Pendampingan oleh Pemerintahan Nagari dan kelompok usaha yang terus menerus membimbing rumah tangga miskin akan meningkatkan kemampuan

orang miskin menjadi produktif. Kedekatan kekerabatan dalam lingkup Nagari juga akan membangkitkan kepedulian semua orang akan upaya penanggulangan kemiskinan. Orang rantau yang mempunyai ikatan emosional akan lebih terpanggil untuk berpartisipasi, seperti kata pepatah Minangkabau "anak dipangku kemenakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan, jago nagari jan binaso".

Suksesnya proses penanggulangan kemiskinan akan bermuara pada tumbuhnya "rasa bernagari" yang akhirnya akan mengedepankan kembali ketahanan dan kesetiakawanan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat Nagari. Hal ini sangat penting karena semua pembangunan daerah di Sumatera Barat nantinya akan diselenggarakan dengan berbasiskan nagari atau nagari dijadikan sebagai basis pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan pada tataran nagari karena disamping nagari yang berhadapan secara langsung dengan keluarga miskin, pertimbangan lainnya karena nagari mempunyai potensi modal sosial nagari yang dapat digali dan dimanfaatkan untuk merubah perilaku keluarga miskin. Proses penanggulangan kemiskinan di nagari juga mengutamakan proses yang benar dan hasil yang berkelanjutan.

Kredit Mikro Nagari disalurkan kepada Daerah Kabupaten/Kota, Nagari dan kelompok masyarakat miskin dengan kriteria sebagai berikut (Petunjuk Teknis KMN, 2009:17-18):

- 1) Kriteria Daerah kabupaten/kota

- a) Penanggulangan kemiskinan dijadikan sebagai prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD dan KUA.
 - b) Penyediaan dana pendampingan sebesar dana yang dialokasikan oleh provinsi kepada daerah kabupaten/kota.
 - c) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kabupaten/kota.
- 2) Kriteria Nagari
- a) Berdasarkan proporsi atau jumlah RTM (KK) yang ditetapkan BPS.
 - b) Bukan nagari yang mempunyai resiko tinggi (perbankan).
 - c) Bukan nagari dalam konflik internal.
 - d) Mempunyai minimal 1 (satu) kelompok perempuan pada masing-masing nagari.
 - e) Penentuan akhir nagari terpilih dilakukan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan usulan kabupaten/kota.
 - f) Nagari yang mempunyai Pasar Nagari.
- 3) Kriteria Kelompok
- a) Prioritas diberikan bagi kelompok usaha yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat (bukan kelompok yang baru dibentuk karena adanya Kredit Mikro Nagari) dan tidak dalam melaksanakan kredit dan program lainnya.
 - b) Kegiatan atau jenis usaha yang akan dilakukan kelompok diharuskan sejenis dan diupayakan saling terkait dengan kelompok lainnya.

- c) Mayoritas anggota kelompok RTM (komposisi 70:30).
 - d) Besaran kelompok (kelompok kecil antara 3-5 orang dan kelompok besar 20-25 orang).
- 4) Kriteria Individu
- a) Individu berasal dari keluarga miskin, sebagaimana tercantum dalam data rumah tangga miskin BPS.
 - b) Prioritas bagi individu yang mempunyai tanggungan anggota keluarga yang banyak.
 - c) Anggota kelompok lembaga yang sudah ada.
 - d) Persetujuan dari lembaga/institusi/kekerabatan yang ada.
 - e) Belum pernah mendapat tambahan modal dari program penyediaan kredit mikro lainnya.

Berdasarkan Petunjuk Teknis KMN (2009:9) strategi yang digunakan dalam penyaluran Kredit Mikro Nagari adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat miskin, baik penduduk laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan untuk memperoleh jaminan dalam pemenuhan hak-hak dasar. Mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan partisipasi masyarakat serta terwujudnya kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas/pertanggungjawaban.
- 2) Pemberdayaan masyarakat, untuk memperkuat kemampuan dalam mengelola potensi dan sumberdaya sosial ekonomi masyarakat, sehingga dapat mendorong perekonomian yang berkelanjutan.

- 3) Peningkatan kapasitas nagari, peningkatan kemampuan nagari sebagai unit pemerintahan terdepan dan kesatuan masyarakat hukum adat dalam meningkatkan ketahanan masyarakat dan pembangunan wilayah nagari. Selain itu, meningkatkan peran fungsi lembaga masyarakat (BPD/Bamus, LPM dan lembaga lainnya).
- 4) Perluasan kesempatan bagi keluarga miskin, untuk mendapatkan aksesibilitas permodalan yang murah dan mudah dengan jaminan sosial dari masyarakat dan institusi nagari.
- 5) Peningkatan sinergitas program pembangunan oleh pemerintah dalam konteks kewilayahan nagari.
- 6) Pembentukan dan pengembangan lembaga pengelola keuangan di tingkat nagari/desa/kelurahan.

B. Temuan Penelitian Sejenis

Kajian penelitian yang relevan ini adalah bagian yang menguraikan tentang beberapa pendapat atau hasil yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Penelitian yang relevan dengan penelitian adalah:

Siska Anggraini (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Zakat terhadap Kemiskinan dan Pendapatan Masyarakat Tahun 2005 yang menggunakan *polling data* menurut 33 propinsi di Indonesia pada tahun 2005 menemukan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia dipengaruhi secara

signifikan oleh: 1) Pertumbuhan ekonomi, 2) Upah minimum, dan 3) Zakat tersalurkan pada $\alpha = 5\%$.

Nyak Ilham dkk. (2006) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Kebijakan Harga Pangan terhadap Ketahanan Pangan yang menggunakan data sekunder *time series* tahun 1975 hingga tahun 2004, menemukan bahwa ketahanan pangan di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh: 1) Kebijakan harga pangan, dan 2) Pertumbuhan ekonomi. Kemiripan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan analisis *Error Correction Model* untuk mengetahui efektivitas suatu kebijakan dan memasukkan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel yang relevan.

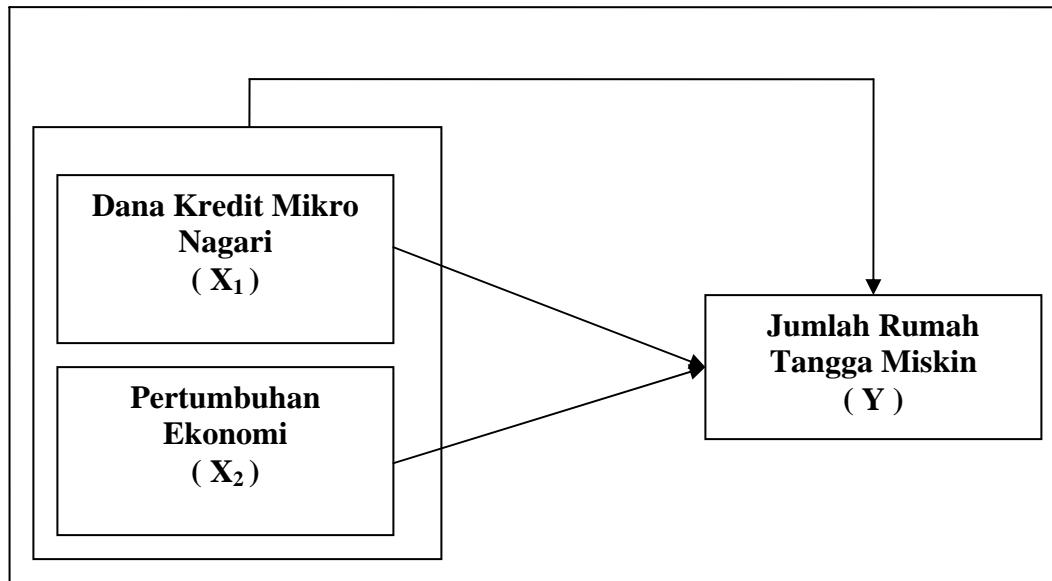
C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau kerangka berfikir adalah sebuah konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan persepsi keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat yang akan diteliti berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah.

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh program pengentasan kemiskinan Kredit Mikro Nagari terhadap jumlah rumah tangga miskin kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat. Adapun variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah dana program Kredit Mikro Nagari (X_1), pertumbuhan ekonomi (X_2) sebagai variabel bebas, dan jumlah rumah

tangga miskin (Y) kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat sebagai variabel terikat

Secara skematis kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Efektivitas Program Kredit Mikro Nagari dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Sumatera Barat.

D. Hipotesis

Berdasarkan masalah penelitian, maka dapat dikemukakan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang hendak dibahas melalui penelitian ini.

Adapun hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Dana Kredit Mikro Nagari mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jumlah rumah tangga miskin di kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jumlah rumah tangga miskin di kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Dana Kredit Mikro Nagari dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah rumah tangga miskin di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$$

$$H_a : \text{Salah satu } \beta \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian data dan pembahasan terhadap hasil penelitian antara variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana Kredit Mikro Nagari mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah rumah tangga miskin di kabupaten/kota Sumatera Barat dalam jangka pendek dengan nilai $-t_{hitung} = -2,0186 >$ nilai $-t_{tabel} = -2,0058$ ($prob = 0,0443$), dan dalam jangka panjang mempunyai pengaruh yang signifikan dengan nilai $-t_{hitung} = -2,8265 <$ nilai $-t_{tabel} = -2,0049$ ($prob = 0,0066$). Berarti dalam jangka pendek dan jangka panjang hipotesis alternatif diterima dan terdapat pengaruh yang signifikan antara dana Kredit Mikro Nagari (X_1) terhadap jumlah rumah tangga miskin di kabupaten/kota Sumatera Barat (Y) dengan asumsi *ceteris paribus*.
2. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap jumlah rumah tangga miskin di kabupaten/kota Sumatera Barat dalam jangka pendek dengan nilai $-t_{hitung} = -0,3855 >$ nilai $-t_{tabel} = -2,0058$ ($prob = 0,7014$), dan dalam jangka panjang mempunyai pengaruh yang signifikan dengan nilai $-t_{hitung} = -7,8212 <$ nilai $-t_{tabel}$ sebesar $-2,0049$ ($prob = 0,0000$). Berarti hipotesis alternatif ditolak dan

terdapat pengaruh yang tidak signifikan dalam jangka pendek antara pertumbuhan ekonomi (X_2) terhadap jumlah rumah tangga miskin di kabupaten/kota Sumatera Barat (Y) dengan asumsi *ceteris paribus*. Sedangkan dalam jangka panjang hipotesis alternatif diterima dan terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi (X_2) terhadap jumlah rumah tangga miskin di kabupaten/kota Sumatera Barat (Y) dengan asumsi *ceteris paribus*.

3. Dana Kredit Mikro Nagari dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah rumah tangga miskin di kabupaten/kota Sumatera Barat dalam jangka pendek dengan nilai F_{hitung} sebesar 3,7196 dan F_{tabel} sebesar 2,7800 atau probabilitas atau signifikansi sebesar $0,0259 < \alpha$, dan dalam jangka panjang dengan nilai F_{hitung} sebesar 38,8307 dan F_{tabel} sebesar 3,1700 atau probabilitas atau signifikansi sebesar $0,0000 < \alpha$.. Berarti hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terbukti diterima bahwa secara bersama-sama dana Kredit Mikro Nagari dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah rumah tangga miskin di kabupaten/kota Sumatera Barat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi, dana Kredit Mikro Nagari dan pertumbuhan ekonomi dapat dipakai untuk memprediksi besarnya jumlah rumah tangga miskin di kabupaten/kota Sumatera Barat. Semakin tinggi dana Kredit Mikro Nagari maka semakin menurun jumlah rumah tangga miskin, dan

semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin menurun jumlah rumah tangga miskin di kabupaten/kota Sumatera Barat.

B. Saran

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan hasil hipotesis penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk mengefektifkan program pengentasan kemiskinan Kredit Mikro Nagari diharapkan kepada pemerintah agar meningkatkan jumlah penerima bantuan pengentasan kemiskinan ini dan meningkatkan kualitas pemberdayaan kepada masyarakat miskin.
2. Melakukan pengembangan sektor unggulan yang terdapat di Sumatera Barat, misalnya pada sektor pertanian, dengan tujuan mampu menyerap banyak tenaga kerja selanjutnya dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang diiringi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
3. Pemerintah lebih meningkatkan perhatian kepada masyarakat miskin melalui pemberian bantuan pengentasan kemiskinan, baik berupa modal uang, keterampilan, kesehatan, atau beasiswa pendidikan.
4. Perlu diperhatikan agar berbagai program penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh masyarakat miskin dalam artian mereka mandiri dan tidak secara terus menerus mendapatkan bantuan dari pemerintah, sehingga mereka benar-benar lepas dari kemiskinan itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Siska. 2007. "Pengaruh Zakat Terhadap Kemiskinan dan Pendapatan Masyarakat Tahun 2005". *Skripsi*. Jakarta: Jurusan Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
- Anthony, Robert N. dan Vijay Govinjaran. 2002. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arsyad, Lincoln. 1995. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbit STIE YPKN.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2008. *Sumatera Barat (per kabupaten/kota dalam Angka)*. Padang.
- Bahri, Syaiful. 2003. *Penanggulangan Kemiskinan dengan Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan*. ditemukan tanggal 5 Juni 2010. Dari <http://www.damandiri.or.id/file/syaifulbahriunairbab2.pdf>
- BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat. 2009. *Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari*. Padang.
- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Case, Karl E. dan Ray C. Fair. 2003. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro Edisi Kelima*. Jakarta : Indeks Kelompok Gramedia.
- Dani, Rustian. 2009. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Semen PT Semen Padang di Provinsi Sumatera Barat". *Skripsi*. Padang: Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang.
- Djojohadikusumo. 1990. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Fatchanie, Meutia. 2007. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Hasil Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Sleman*. Ditemukan Tanggal 17 September 2010. Dari <http://www.docstoc.com/.../ANALISIS-EFISIENSI-DAN-EFEKTIVITAS-PAJAK-PARKIR-KABUPATEN>.

- Gujarati, Damodar N. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga.
- , 2003. *Basic Econometrics Fourth Edition*. Singapore : Library of Congress.
- , 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta : Erlangga.
- Hafizah, Meirisa Rezeki. 2009. "Analisis Penawaran Crude Palm Oil (CPO), Indonesia: Pendekatan Error Correction Model". Ditemukan Tanggal 17 Juli 2010. Dari <http://www.iirc.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/14088/1/H09mrhabstract.pdf>
- Hasriati, Afni. 2005. "Pengembangan Sektor Unggulan Sebagai Salah Satu Alternatif Pengentasan Kemiskinan di Propinsi Sumatera Barat". *Skripsi*. Jakarta: Jurusan Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
- Ilham, Nyak dkk. 2006. *Efektifitas Kebijakan Harga Pangan Terhadap Ketahanan Pangan*. Ditemukan Tanggal 3 September 2010. Dari <http://www.pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/JAE%2024-2c.pdf>
- Irawan, Bambang. 2008. *Meningkatkan Efektifitas Kebijakan Konversi Lahan*. Ditemukan Tanggal 17 September 2010. Dari <http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/FAE26-2e.pdf>
- Muharja, Fajri. 2000. "Tingkat dan Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Menurut Daerah Tingkat II di Sumatera Barat". *Skripsi*. Padang: Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Universitas Negeri Padang.
- Nasha, Ressy Engla. 2006. "Kontribusi Zakat Pada BAZ Kota Padang Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang". *Skripsi*. Padang: Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Universitas Negeri Padang.
- Nazir, Mohammad. 2002. *Metode Penelitian*. Darussalam : Ghalia Indonesia.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2006. *Credit Management Handbook*. Ditemukan Tanggal 6 Desember 2010. Dari <http://dspace.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/1060/bab2b.pdf?sequence=9>.
- Samuelson, Paul.A. 1996. *Ekonomi*. Jakarta:Erlangga.
- Sinaga, Wivo Prawiska. 2007. "Perbandingan Efektivitas Jalur Nilai Tukar dan Jalur Suku Bunga Dalam Mencapai Stabilitas Harga". *Skripsi*. Jakarta: Jurusan Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.

- Suhardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: UPP AMPYPKN.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2007. *Ekonometrika Pengantar*. Yogyakarta : BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Suryanti, Wanti. 2006. “Pengaruh Kemitraan Terhadap Perkembangan Usaha Kecil di Kotamadya Padang”. *Skripsi*. Padang: Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Edisi Kedelapan)*. Jakarta: Erlangga.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. *Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjoekam. 1999. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wijaya, Faried. 1999. *Ekonomika Makro Aneka Model Baku*. Yogyakarta : BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Zahira. 2005. “Pergerakan Investasi di Indonesia Serta Variabel-varibel Ekonomi Makro yang Mempengaruhinya”. *Skripsi*. Jakarta: Jurusan Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.